



IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

Iwan Sutiarmo, Y. Warella, Susi Sulandari

ABSTRACT

This research focus is on a leaving out poverty program in the Subdistrict of Tempuran. The purpose of research is to know the implementation process and also to know some factors which influence it and finally it is going to give recommendation for improving of PPK. This research is a kind of phenomenology perspective and qualitative research. The certain objective of PPK are improving the society's earning, the ability social institute, and the society's participation. Some factors which support for implementation of PPK are policy planning, clarity order of policy, the policy informing, the stakeholder's of implementation; financing, the organization culture, to sell asset, the stakeholder's attitude and the performance of target groups to get successful implementations of PPK in Tempuran.

Therefore, the members of socialization must have good understanding of background, the objectives and PPK principles. they must know the rule and objectives of PPK. The technical procedure and implementation are not only to regulate some main plots, but also innovation and creativity based on the certain condition in their region.

Keyword : *The Subdistrict Development Program (PPK), Community Development, poverty.*

A. PENDAHULUAN

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dengan mengedepankan konsep pem-

berdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dari masyarakat guna kesuksesan program-program pembangunan. Selain itu, keberadaan Program Pengembangan Kecamatan

(PPK) sendiri juga diharapkan mampu mengembangkan kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah, khususnya Kecamatan dan Desa. Program Pengembangan Kecamatan PPK dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran kritis, pembelajaran, pengembangan kapasitas para pelaku pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat dan prakarsa Pemerintah Daerah dalam pengelolaan program, sehingga mampu mengembangkan PPK sebagai salah satu model penanggulangan kemiskinan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini secara umum bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi dan partisipatif dengan memperkuat kemampuan kecamatan dan desa-desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.

Kabupaten Magelang terdapat 4 (empat) kecamatan yang menerima Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan pembiayaan *full grant* dari pemerintah pusat yaitu : Kecamatan Ngablak, Kecamatan Windusari, Kecamatan Kaliangkrik dan Kecamatan

Kajoran serta terdapat 2 (dua) kecamatan yang dibiayai melalui pendanaan secara *matching grant* yaitu : Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Pakis.

Kecamatan Tempuran sudah memperoleh bantuan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dimulai pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 namun dalam perkembangannya ternyata jumlah keluarga miskin relatif cukup tinggi.

Permasalahan mendasar yang terjadi dalam pelaksanaan PPK di Kecamatan Tempuran adalah angka kemiskinan yang memiliki tren naik dalam 3 (tiga) tahun terakhir, padahal sejak tahun 2003 sudah ada program PPK sebagai program penanggulangan kemiskinan. Permasalahan mendasar yang lain adalah rendahnya akses masyarakat miskin absolut terhadap bantuan dana PPK karena kalah bersaing dengan masyarakat miskin yang memiliki potensi usaha padahal masyarakat miskin absolut jumlahnya cukup tinggi di Kecamatan Tempuran.

Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang?
3. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, pada akhirnya penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi perbaikan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, baik pada level kebijakan maupun pada level implementasi.

Dalam membahas pelaksanaan PPK di Kecamatan Tempuran tinjauan kepustakaan yang digunakan sebagai berikut :

Penelitian ini pada dasarnya adalah berusaha melihat secara lebih detail mengenai pelaksanaan (*implementation*) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan mengambil kasus di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Secara lebih spesifik penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui proses pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tempuran dalam mengentaskan kemiskinan;

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik
Kebijakan Publik adalah tema yang tak akan pernah berhenti untuk dibahas. Kebijakan publik ada sejak manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Konsekuensi dari kehidupan bermasyarakat tersebut akan terbina suatu tatanan yang mengatur kehidupan mereka. Tatanan dan aturan untuk mengatur kehidupan sosial di masyarakat ini lah yang disebut kebijakan publik. Jika merujuk pada pengertian dasarnya, yaitu sebagai perwujudan keinginan dari para sarjana sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial di lapangan

atau *Close the gap between knowledge and policy* (Parson, 1997:21).

Thomas R.Dye (1972) sendiri menyatakan hanya pemerintah yang memiliki *authoritative* untuk mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat dan untuk mengalokasikan nilai-nilai yang menjadi tujuan tersebut diwujudkan dalam suatu kebijakan, yang dapat ditempuh dengan melakukan atau tidak melakukan, karena sebagaimana dikatakan kebijakan publik *“is whatever governments choose to do or not to do”*.

Definisi mengenai Implementasi kebijakan dari beberapa pakar memang sangat variatif tergantung sudut pandang para pakar tersebut. Menurut Andersson (1990:172) Implementasi dilihat sebagai :

administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals

Menurut O'Toole (2000:266) Implementasi kebijakan diartikan sebagai apa yang

sudah dikembangkan antara pembuatan tujuan yang jelas dari instansi pemerintah untuk *“to do something or stop to do something”* yang tentunya akan mengakibatkan dampak dari pelaksanaan implementasi tersebut. Ferman (1990) mengemukakan pendapat Implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara ekspektasi (harapan) dengan hasil kebijakan.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah salah satu program pengentasan kemiskinan yang dalam kegiatannya sangat bernuansa partisipatif dan sangat strategis, sehingga menempatkan masyarakat sasaran sebagai subjek dalam mengatasi kemiskinannya sendiri. Bahkan dalam kerangka ini, pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitasi saja, sedangkan faktor dominan yang berperan dalam rangkaian proses tersebut adalah pihak swasta, dalam hal ini konsultan dengan seluruh jajarannya. Program

Pengembangan Kecamatan PPK diperoleh pemerintah dari bantuan luar negeri yang diperuntukkan bagi negara-negara yang dilanda krisis ekonomi, termasuk salah satunya adalah Negara Indonesia.

Program PPK berpegang pada prinsip Transparansi, Keberpihakan pada Orang Miskin, Partisipasi masyarakat dan Kompetisi sehat, yang lebih dikenal dengan **SiKOMPAK**. PPK juga memberi wewenang kepada masyarakat untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif. Berangkat dari kesadaran akan pentingnya pemeliharaan dan pelestarian kegiatan yang telah dilakukan, pada PPK III Tahun 2005 dikembangkan dua prinsip lainnya, yakni : Akuntabilitas dan Keberlanjutan. Prinsip ini tidak dapat dipisahkan dari SiKOMPAK dan menjadi **SiKompak Aku Lanjut**.

Maksud digulirkannya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, pe-

nguatan kelembagaan masyarakat & pemerintah daerah, dan perwujudan prinsip-prinsip *good governance*. Secara umum, tujuan dari diluncurkannya PPK adalah untuk mem-percepat penanggulangan kemiskinan serta mening-katkan kemampuan kelem-bagaan masyarakat yang ditempuh melalui pemberian modal usaha untuk pengem-bangan kegiatan usaha ekonomi produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung di pedesaan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Tujuan tersebut di atas dijabarkan lagi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiata usaha produktif bagi masyarakat miskin
- 2) Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi, termasuk pendidikan dan kesehatan.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses keputusan secara partisipatif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, peman-

tauan dan evaluasi serta pelestarian hasil kegiatan.

- 4) Mengembangkan partisipasi kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan kegiatan.

Sasaran utama PPK adalah kelompok penduduk miskin perdesaan pada kecamatan miskin. Kecamatan lokasi PPK ditentukan oleh Tim Koordinasi PPK Pusat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan:

- a. Jumlah penduduk miskin.
- b. Peringkat kemiskinan.
- c. Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- d. Indeks kualitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai

sasaran tersebut (*Wibawadkk, 1994:15*). Di dalam "cara" terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yaitu : siapa implementornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan publik. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut implementasi. Kinerja diartikan sebagai bentuk prestasi atau hasil dari perilaku pekerja tertentu yang merupakan fungsi dari kemampuan (*ability*) dukungan (*support*) dan usaha (*effort*).

Menurut Sofyan Effendi (2000:23) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : (1) faktor kebijakan yang terdiri dari : tipe kebijakan, manfaat kebijakan, lokasi pengambilan keputusan, *scoope* tujuan kebijakan, legitimasi pembuat kebijakan dan persepsi tentang kebijakan. (2) faktor organisasi yang terdiri dari : tipe organisasi,

ukuran organisasi, saling ketergantungan atau interdependensi, struktur implementator atau *implementation structure*, sumber daya resources, dan budaya organisasi. (3) faktor lingkungan terdiri dari : kondisi sosial, ekonomi dan budaya, kondisi demografis. Pendapat-pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan atau *compliance* pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

Tangkilisan (2003:11) mengemukakan pendapat bahwa dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan tentunya menghadapi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut, sebab implementasi setiap kebijakan adalah sebuah proses yang dinamis yang meliputi

interaksi berbagai variabel. Goggin (1990:38) mengatakan juga salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi adalah kapasitas organisasi (*organizational capacity*) yang memiliki tiga elemen yaitu *organization structure*, *personel*, dan *financial resources*. Kapasitas organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama (*get its act together*) untuk mewujudkan preferensi-preferensinya (tujuan dan sasaran).

3. Kemiskinan dan Pembangunan masyarakat (Community Development)
 - a. Kemiskinan
Menurut BKKBN, miskin mempunyai ciri-ciri keluarga sebagai berikut. Pertama, tidak dapat menjalankan ibadah menurut agamanya. Kedua, seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari. Ketiga, seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian. Keempat, bagian terluas dari rumahnya berlantai

tanah. Kelima, tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Dinas kesehatan mendefinisikan miskin dengan menambahkan kriteria tingkat akses ke pelayanan kesehatan pemerintah, ada anggota keluarga yang putus sekolah atau tidak, frekuensi makan makanan pokok per hari kurang dari dua kali dan kepala keluarga mengalami pemutusan hubungan kerja atau tidak. Atas dasar kriteria kemiskinan ini, Dinas Kesehatan mengarahkan sasaran program-programnya yang berkaitan dengan masyarakat miskin.

BPS mendefinisikan miskin berdasarkan tingkat konsumsi makanan kurang dari 2100 kalori/kapita/hari dan kebutuhan minimal non-makanan (Kantor Menko Kesra dan Taskin, 1999), disamping itu secara ekonomi BPS menetapkan penghasilan US \$ 0,55 perhari sebagai batas miskin di perkotaan, dan US \$ 0,4 di pedesaan. *International Labour Organization* (ILO) mendefinisikan miskin secara ekonomi berdasarkan penghasilan kurang US \$ 1

perhari bagi penduduk perkotaan, dan US \$ 0,8 untuk penduduk pedesaan. Bank Dunia mendefinisikan miskin secara ekonomi berdasarkan penghasilan kurang dari atau sama dengan US \$ 1 perhari. Definisi kemiskinan yang dipakai MDGs adalah versi Bank Dunia.

Menurut Depsos (2002:4) Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per-orang per-hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang

diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat (SMERU dalam Suharto dkk, 2004).

- b. Pembangunan Masyarakat (Community Development)
- Community Development* (CD) yang oleh para praktisi pembangunan sering diterjemahkan sebagai pembangunan masyarakat, pengembangan masyarakat, maupun pemberdayaan masyarakat, merupakan sebuah wacana pendekatan pembangunan yang telah dimulai sejak periode 1960-an. Konsep *Community Development* telah banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikannya:
- as the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nations,*

and to enable them to contribute fully to national progress". (Luz. A. Einsiedel 1968:7)

Definisi tersebut menekankan bahwa pembangunan masyarakat, merupakan suatu "proses" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional. Sedangkan Arthur Dunham merumuskan definisi *Community Development* adalah :

organized efforts to improve the conditions of community life, and the capacity for community integration and self-direction. Community Development seeks to work primarily through the enlistment and organization of self-help and cooperative efforts on the part of the

residents of the community, but usually with technical assistance from government or voluntary organization. (Arthur Dunham 1958: 3)

Perspektif Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam perspektif fenomenologis karena bermaksud mendapatkan gambaran nyata pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) secara sistematis dan faktual di lapangan serta kecenderungan pencapaian hasil program.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada yakni keadaan menurut gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 1996 : 309). Penelitian dimaksud tidak hanya terbatas pada pengumpulan data tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Di samping itu, semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci

terhadap apa yang diteliti (Moleong, 2001:6). Penelitian deskriptif pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam penelitiannya tidak perlu menentukan hipotesis (Arikunto, 1996 : 245). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, karakteristik, situasi atau kejadian pada suatu daerah tertentu secara sistematis, faktual dan akurat sebagaimana adanya (Muchtar, 2000:127).

Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada fenomena kemiskinan yang ada di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, upaya pengentasan kemiskinan melalui pembangunan masyarakat (*community development*) yang didalamnya terkandung pola pemberdayaan masyarakat, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan dan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tempuran serta faktor pendukung dan penghambat

dalam implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut di atas.

Unit Analisis dan Informan

Unit analisis dalam penelitian ini berada pada level *Implementation structure* di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan kelompok sasaran atau *target group* dari program PPK yaitu kelompok masyarakat miskin dan kelembagaan masyarakat yang ada di perdesaan yang secara langsung menjadi sasaran program PPK. Penentuan unit analisis dilakukan secara sengaja dalam relevansinya dengan tujuan penulisan. Teknik pengambilan informan dengan menggunakan teknik *Snowball sampling*. Adapun sumber informasi diperoleh dari beberapa informan kunci atau *key informan* sebagai berikut:

- a. Camat selaku penanggungjawab PPK di tingkat Kecamatan
- b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK)
- c. Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PjAK)

- d. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
- e. Fasilitator Kecamatan
- f. Kepala Desa di Kecamatan Tempuran
- g. Kelompok Masyarakat
- h. Masyarakat selaku target group

Berdasarkan teknik *snowball sampling* maka dari informan kunci di atas di lapangan berkembang dan bertambah menjadi beberapa informan antara lain: pelaksana kegiatan PPK, pelaksana Simpan Pinjam khusus Perempuan, pelaksana kredit Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan masyarakat yang bukan merupakan target group dari PPK.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah penulis sendiri. Alat kedua yaitu *tape-recorder* yang digunakan untuk merekam hasil wawancara peneliti dengan informan; alat ketiga yaitu berbagai arsip-arsip penting, dokumen, foto-foto maupun kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelum penelitian dilaksanakan.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk data primer, penulis menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan sumber informasi terpilih dan melalui jawaban kuesioner bagi *target group*, sedangkan data sekunder dipilih penulis melalui observasi, penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara; dan studi dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Yin dalam Suprayogo & Tobroni, 2001, h. 192).

B. PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

- a. Kondisi Umum Kecamatan Tempuran
Jumlah desa yang ada di Kecamatan Tempuran sebanyak 15 desa tersebut,

terdapat 6 desa berada di dataran tinggi (pegunungan) sedangkan sisanya merupakan desa yang ada di dataran rendah dan banyak terdapat pabrik.

Berdasarkan data dari PT ASKES pada tahun 2006 angka kemiskinan di Kecamatan Tempuran mencapai 17.704 jiwa. Berangkat dari hal ini dapat diketahui bahwa dengan jumlah penduduk usia produktif yang sangat mendominasi, namun angka kemiskinan juga tinggi. Implikasinya adalah masyarakat di kecamatan tempuran mayoritas miskin dan perlu upaya pemberdayaan yang harus dilakukan demi pengentasan kemiskinan. Pola pemberdayaan yang dilakukan sebaiknya melalui penjangkauan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang salah satu wujud nyata adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Tempuran memeluk agama Islam sebanyak 44.131 orang (99,32%)

sehingga nilai-nilai keagamaan banyak tercermin dari perilaku sehari-hari masyarakat Tempuran. sebagian besar penduduk di Kecamatan Tempuran hanya mengenyam pendidikan tamat SD yaitu sebanyak 17.853 orang (44,09%). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini merupakan salah satu indikator bahwa tingkat kemiskinan di Kecamatan Tempuran yang cukup tinggi, karena dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dimana penduduk Kecamatan Tempuran mayoritas lulusan SD ataupun tidak lulus SD (56,04%), maka masyarakat akan sangat sulit untuk berkompetisi dalam mengakses sumber daya (*resources*) yang ada di daerah dibandingkan masyarakat lain yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. penduduk Kecamatan Tempuran yang bermata pencaharian sebagai buruh sebanyak 42,58%. Tingginya jumlah buruh di Kecamatan Tempuran berakibat pada sulitnya usaha pemberdayaan masyarakat karena

masyarakat dengan mata pencaharian buruh akan sangat sulit untuk diberdayakan karena telah terikat dengan para pengusaha pemilik modal selain itu para buruh kurang memiliki keterampilan di bidang lain dan juga kurang memiliki jiwa wirausaha.

Kepala keluarga miskin di Kecamatan Tempuran jumlahnya mencapai 4.152 jiwa atau 30,81% dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga. Sejak 3 (tiga) tahun yang lalu trend angka kemiskinannya cenderung mengalami kenaikan, terlebih lagi sejak pemerintah menggulirkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin mengakibatkan angka kemiskinan menjadi melonjak drastis.

Hasil Penelitian

Kecamatan Tempuran merupakan satu dari enam Kecamatan di Kabupaten Magelang yang menerima Program Pengembangan Kecamatan, karena Kecamatan Tempuran termasuk kecamatan miskin di Kabupaten Magelang, di samping itu mayoritas

masyarakatnya juga merupakan masyarakat miskin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang, banyaknya rumah tangga miskin di Kecamatan Tempuran pada Tahun 2006 sebanyak 4.152 Kepala Keluarga atau 30,81% dari jumlah keluarga di Kecamatan Tempuran.

Sasaran utama program PPK di Kecamatan Tempuran adalah masyarakat miskin melalui kelompok yang diikutinya. Masyarakat miskin yang mendapat prioritas menjadi sasaran PPK adalah masyarakat miskin yang memiliki usaha, artinya masyarakat miskin yang memiliki kegiatan usaha meskipun usahanya itu sangat kecil seperti jualan tempe di pasar yang omzetnya per hari tidak mencapai Rp 50.000,- asal masyarakat miskin itu memiliki usaha, maka dia berhak menggunakan dana PPK melalui kelompoknya.

Pelaku PPK antara lain : Camat selaku penanggung jawab PPK di tingkat Kecamatan; Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK); Penanggung jawab

Administrasi Kegiatan (PjAK); Unit Pengelola Kegiatan (UPK); Fasilitator Kecamatan; Kepala Desa di Kecamatan Tempuran; Kelompok Masyarakat; Masyarakat selaku target group Implementasi program PPK di Kecamatan Tempuran urutan kegiatannya adalah sebagai berikut: MAD Sosialisasi; Musdes Sosialisasi; Musdes Perencanaan; Verifikasi Usulan Kegiatan; MAD Prioritas Usulan; MAD Penetapan Usulan; Musdes Informasi; Pelaksanaan Kegiatan; Monitoring dan Evaluasi; dan Pelestarian Hasil Kegiatan

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PPK di Kecamatan Tempuran

- a) Kebijakan
Keberhasilan kebijakan Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) sangat ditentukan oleh banyak faktor, karena kebijakan pembangunan ini pada dasarnya memang merupakan pendekatan yang menekankan proses pemberdayaan sejati mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu pemba-

ngunan manusia seutuhnya. Keberhasilan implementasi kebijakan Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tempuran, dapat terlihat pada pengentasan kemiskinan melalui *Community Management*. Faktor kebijakan yang ikut berpengaruh dalam implementasi PPK di Kecamatan Tempuran meliputi : konsistensi kebijakan; perencanaan kebijakan; kejelasan pesan kebijakan; dan penyeragaman kebijakan.

b) Organisasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan PPK (Proyek Program Pengembangan Kecamatan) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang berasal dari aspek organisasi adalah : pelaku implementasi PPK; Pendaan dan Budaya Organisasi.

c) Lingkungan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan PPK (Proyek Program Pengembangan Kecamatan) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang berasal dari faktor lingkungan meliputi : aspek budaya;

kondisi ekonomi; dan godaan untuk menjual asset.

d) Sikap/kecenderungan (disposisi)

Sikap/kecenderungan merupakan ekspresi ataupun tindakan responsif dari para pemangku kepentingan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap implementasi PPK. Sikap penerimaan atau penolakan baik dari pelaksana PPK maupun *target group* ternyata juga mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi PPK. Sikap para pemangku kepentingan itu didasarkan pada keinginan dari masing-masing pihak apakah sudah terpuaskan atau belum. Sikap/kecenderungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu : sikap pelaku PPK maupun sikap dari target group.

Diskusi

a) PPK dalam Mengentaskan Kemiskinan

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan kelompok

masyarakat (Pokmas) miskin yang merupakan kelompok sasaran atau *target group*. Selain itu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) juga diharapkan mampu menciptakan kesempatan untuk bekerja bagi masyarakat miskin yang belum memiliki pekerjaan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Fenomena Kemiskinan di Kecamatan Tempuran dalam tiga tahun terakhir tergolong masih tinggi bahkan mengalami *trend* yang naik, meskipun Kecamatan Tempuran sudah mendapatkan dana PPK selama tiga tahun terakhir. Namun data tersebut tidak cukup beralasan untuk mengatakan bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tempuran mengalami kegagalan karena tidak mampu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk miskin. Indikator yang dipakai untuk menganalisis Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Tempuran dalam penelitian ini.

1) Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tempuran sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan ternyata cukup mampu untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat (Pokmas) miskin yang merupakan kelompok sasaran atau *target group*. Pendapatan yang diperoleh dari bantuan modal dari PPK meskipun cukup signifikan tetapi tidak mampu mengimbangi laju harga kebutuhan dasar masyarakat desa. Tentu saja hal ini menjadi suatu hal yang kontradiktif yang terjadi di kalangan masyarakat miskin di Kecamatan Tempuran

Peningkatan pendapatan bagi warga miskin Kecamatan Tempuran tersebut di atas dapat diketahui dari beberapa indikator yang dipakai dalam penelitian ini, adapun indikator untuk mengetahui peningkatan tingkat pendapatan masyarakat miskin di Kecamatan Tempuran sebagai berikut :

a) Kemajuan Usaha

Dalam pelaksanaan program PPK ini, maka terjadi peningkatan kegiatan usaha, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan sumber pendapatan bagi masyarakat desa yang ada di Kecamatan Tempuran. Sasaran utama dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tempuran adalah warga miskin produktif yang melembagakan diri dalam kelompok masyarakat, sehingga secara tidak langsung keberadaan PPK akan membantu memajukan usaha yang ada di desa tersebut. Warga miskin tersebut menggunakan bantuan pinjaman dana yang diperoleh dari PPK untuk berbagai jenis usaha seperti dalam tabel 5. kemajuan usaha dapat dilihat dari beberapa instrumen yaitu : Kelayakan modal usaha; Kelancaran sirkulasi modal; Letak tempat usaha; dan Peningkatan volume usaha.

b) Efektivitas pemanfaatan dana

Masyarakat yang mengakses pinjaman modal usaha dari PPK Tempuran dalam pemanfaatannya belum sepenuhnya efektif dalam pemanfaatannya. Masih banyak warga miskin yang menggunakan dana pinjaman untuk keperluan yang bersifat konsumtif sehingga pemanfaatan dana PPK menjadi tidak efektif bahkan salah sasaran. Beberapa warga miskin tersebut masih menganggap bantuan dana PPK tersebut sama dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak diikuti dengan kewajiban untuk mengembalikan. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan dana dilihat dari dua hal yaitu : Kesesuaian usaha dengan keterampilan dan Akses bahan baku dan bahan modal.

c) Peningkatan tabungan
Kemajuan usaha dari para target group yang memperoleh bantuan pinjaman dana ternyata

juga mampu meningkatkan tabungan yang dimiliki masyarakat tersebut. Peningkatan tabungan tersebut menggambarkan PPK di Kecamatan Tempuran ternyata mampu meningkatkan pendapatan penduduk. Meskipun besarnya peningkatan tabungan tersebut apabila diteliti lebih jauh belum sebanding dengan peningkatan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

- 2) Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan selain sasarannya adalah kelompok masyarakat miskin dan masyarakat miskin, namun juga memiliki sasaran peningkatan kemampuan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Selain itu juga berusaha membuat *networking* ataupun jaringan antara lembaga yang dibentuk dengan adanya PPK dengan berbagai instansi terkait dan kelompok masyarakat miskin selaku *target*

group. Dengan peningkatan kelembagaan masyarakat yang merupakan wahana bagi masyarakat miskin untuk menyampaikan ide dan gagasan, maka melalui PPK diharapkan penguatan kelembagaan tersebut akan memperkuat posisi masyarakat miskin dalam setiap program pengembangan masyarakat.

PPK Tempuran cukup berhasil dalam memperkuat kelembagaan masyarakat yang ada di Kecamatan Tempuran, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini :

- a) Kemampuan koordinasi pelaksanaan program Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program pengentasan kemiskinan yang melibatkan banyak instansi serta lembaga terkait. Koordinasi merupakan kata kunci dalam suksesnya pelaksanaan PPK khususnya untuk menyelaraskan serta mensinergikan setiap gerak dan langkah yang akan diambil. Di Keca-

matan Tempuran koordinasi yang dilakukan di antara pelaku PPK sudah cukup optimal dilaksanakan, dan setiap pelaku PPK sepenuhnya sudah menyadari tugas dan fungsi serta perannya masing-masing dalam pelaksanaan PPK.

Wujud koordinasi yang dilakukan antar pelaku PPK Tempuran merupakan perwujudan koordinasi antara beberapa pelaku PPK berikut ini :
Koordinasi antara pemerintah dengan TPK, pihak swasta maupun Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan Koordinasi antara UPK dengan TPK maupun POKMAS

- b) Kemampuan menggerakkan partisipasi masyarakat
Kelembagaan yang merupakan pelaku PPK dituntut untuk mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal ini cukup baik dilaksanakan di Kecamatan Tempuran karena cukup tingginya partisipasi masyarakat.
- c) Efektivitas fungsi pelaksana program

Pemanfaatan dana PPK Tempuran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati bersama dalam MAD II sudah cukup baik. Pemanfaatan dana digunakan untuk kegiatan yang mendatangkan kemanfaatan bagi banyak orang khususnya masyarakat miskin. Efektivitas dari pelaksanaan PPK salah satu indikatornya adalah tingkat Kesehatan UPK dalam pengelolaan dana PPK Tempuran.

3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Program PPK sebagai salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan juga mengedepankan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat tersebut. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap PPK akan mempermudah implementasi kegiatan-kegiatan PPK karena seluruh pihak dan pemangku kepentingan telah mengetahui tugas dan fungsinya dalam menyukseskan PPK di

Kecamatan Tempuran. Peningkatan partisipasi ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

- a) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap program

Pada umumnya masyarakat cukup familiar dengan kata-kata PPK, namun pada dasarnya mereka tidak sepenuhnya mengerti dan memahami Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut. Pada intinya mereka hanya mengetahui bahwa PPK adalah program pemerintah untuk pembangunan secara fisik dan simpan pinjam. Pemahaman masyarakat terhadap PPK sendiri dapat dilihat dari dua instrumen yaitu :
Pemahaman terhadap tujuan program dan Pemahaman terhadap mekanisme program

- b) Keterlibatan masyarakat dalam program

Masyarakat secara langsung dapat turut berperan serta dalam setiap kegiatan PPK, karena PPK adalah program pengentasan kemiskinan dari,

oleh dan untuk masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat Kecamatan Tempuran dalam setiap kegiatan PPK sudah cukup baik. Pelibatan masyarakat desa juga dilaksanakan pada setiap musyawarah yang dilaksanakan guna menghasilkan kesepakatan bersama demi pelaksanaan PPK.

Jumlah masyarakat yang hadir serta tingkat keaktifan masyarakat desa dalam forum rapat akan mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil guna kebaikan dan kesejahteraan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin perdesaan. Keterlibatan masyarakat terhadap program PPK di Kecamatan Tempuran dapat dilihat melalui empat indikator yaitu :

Keterlibatan masyarakat dalam rekrutmen ketua kelompok; Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan; Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan; dan Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian

4) Pemberdayaan Perempuan

Program pengembangan kecamatan sangat intens sekali dalam pengembangan/pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Keberhasilan PPK di Kecamatan Tempuran dalam pelaksanaan “gender” baik terhadap kaum perempuan maupun kelompok perempuan sudah cukup baik dilaksanakan. Pelibatan kaum perempuan dalam setiap kegiatan tersebut sebagai salah satu wujud nyata dari pengarusutamaan *gender* di Kecamatan Tempuran. Keterlibatan kaum perempuan maupun kelompok perempuan Program. Keterlibatan kaum perempuan dapat dilihat dari indikator keterlibatan kaum perempuan

dalam musyawarah dan keterlibatan dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan

b) Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi PPK

Program PPK di Kecamatan Tempuran telah melalui proses *community development*, karena proses implementasi PPK juga melibatkan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat baik laki-laki maupun perempuan di setiap kegiatan PPK mulai dari pengajuan usulan yang dibahas melalui Musyawarah Desa sampai dengan kegiatan pelestarian hasil kegiatan PPK. Selain itu tujuan utama *community development* dan Program Pengembangan Kecamatan memiliki kesamaan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasi PPK di Kecamatan Tempuran terdapat faktor pendukung dan penghambat implementasi. Faktor pendukung yang berpengaruh sangat kuat adalah faktor konsistensi kebijakan, karena dengan adanya konsistensi kebijakan setiap kegiatan

yang diupayakan dikembangkan telah sesuai dengan minat masyarakat melalui kesepakatan bersama terhadap usulan kegiatan yang telah dimusyawarahkan. ini sejalan dengan pendapat George C Edwards III yang menyatakan bahwa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk dijalankan), karena apabila konsistensi tidak dijaga, maka akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Adapun faktor penghambat yang paling berpengaruh adalah sikap/kecenderungan (*disposisi*) karena sikap yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan implementasi PPK berpengaruh terhadap pelaksanaan PPK dalam tataran praktis. Faktor sikap (*disposisi*) ini sejalan dengan pendapat van Metter dan van Horn serta George C Edwards III yang menyatakan bahwa sikap penolakan ataupun penerimaan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya

kinerja implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan juga terlihat beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Sofyan Effendi (2000:23) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : (1) faktor kebijakan yang terdiri dari : tipe kebijakan, manfaat kebijakan, lokasi pengambilan keputusan, *scoope* tujuan kebijakan, legitimasi pembuat kebijakan dan persepsi tentang kebijakan. (2) faktor organisasi yang terdiri dari : tipe organisasi, ukuran organisasi, saling ketergantungan atau interdependensi, struktur implementator atau *implementation structure*, sumber daya resources, dan budaya organisasi. (3) faktor lingkungan terdiri dari : kondisi sosial, ekonomi dan budaya, kondisi demografis.

Berdasarkan pendapat Sofyan Effendi tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi PPK di Kecamatan Tempuran tidak hanya menyangkut perilaku

badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan atau *compliance* pada diri target *group*, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

Sedangkan menurut Tangkilisan (2003:11) mengemukakan pendapat bahwa dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan tentunya menghadapi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut, sebab implementasi setiap kebijakan adalah sebuah proses yang dinamis yang meliputi interaksi berbagai variabel. Faktor-faktor inilah yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PPK di Kecamatan Tempuran.

Adapun Goggin (1990:38) mengatakan juga salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi adalah kapasitas organisasi (*organizational capacity*) yang

memiliki tiga elemen yaitu *organization structure*, *personel*, dan *financial resources*. Kapasitas organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama (*get its act together*) untuk mewujudkan preferensi-preferensinya (tujuan dan sasaran). Struktur organisasi dan pendanaan juga berpengaruh dalam implementasi PPK Kecamatan Tempuran senada dengan pendapat Goggin di atas.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Implementasi PPK di Kecamatan Tempuran seluruh prosesnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tahap pelestarian.
- b. Tujuan khusus PPK yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, kemampuan kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat sudah tercapai, namun tujuan umum PPK yaitu penanggulangan kemis-

- kinan di Kecamatan Tempuran belum sepenuhnya tercapai.
- c. Faktor yang mendukung implementasi PPK di Kecamatan Tempuran adalah faktor konsistensi kebijakan dan aspek budaya, sedangkan faktor penghambat implementasi PPK antara lain : perencanaan kebijakan; kejelasan pesan kebijakan; penyeragaman kebijakan; pelaku implementasi: pendanaan; budaya organisasi; godaan untuk menjual asset; sikap pelaku; dan sikap dari *target group*.
 - d. Masyarakat miskin absolut dalam implementasi PPK di Kecamatan Tempuran belum secara langsung tersentuh dan memperoleh kesempatan untuk mengakses dana dari PPK, karena sikap dari para pelaku PPK yang membuat sistem kompetisi yang terjadi diantara masyarakat miskin produktif dan miskin absolut menjadi tidak sehat.

2. Saran

- a. PPK sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan *community development* sebaiknya tidak diatur dengan Petunjuk teknis operasional yang seragam dan sangat detail. Juklak dan juknis hendanya hanya memuat/mengatur rambu-rambunya saja sehingga memungkinkan para pelaku dilapangan membuat diskresi, inovasi dan kreasi sesuai dengan kondisi/kekhasan yang ada di daerah masing-masing.
- b. Sikap para pelaku PPK merupakan faktor utama pendukung keberhasilan program. Oleh karena itu dalam sosialisasi para pelaku harus dibekali/diberikan pemahaman yang mendalam latar belakang, tujuan dan prinsip-prinsip PPK, dengan demikian mereka tidak hanya tahu juklak dan juknis tanpa tahu tujuan yang hendak dicapai.

- c. Guna mengatasi penyimpangan kelompok sasaran PPK seharusnya memiliki acuan tersendiri dalam menentukan kriteria kemiskinan yang digunakan dalam penentuan *target group*, karena selama ini PPK tidak secara jelas dalam menggunakan acuan kriteria kemiskinan apakah versi BPS atau BKKBN ataupun versi yang lainnya. PPK membuat database serta peta kemiskinan di wilayah pedesaan yang diperoleh melalui pendataan terintegrasi antara pihak PPK, pemerintah, lembaga independen dan perwakilan masyarakat, sehingga validitas data yang digunakan untuk menentukan *target group* bisa dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Fauzi, dkk. 2000. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsimi. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Baratakusumah, Deddy Supriady. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Dalam Negeri RI. 2003. *Laporan Program Pengembangan Kecamatan Fase II*, Laporan Tahun kedua.

Departemen Dalam Negeri RI. 2004. *Laporan Program Pengembangan Kecamatan Fase II*. Laporan Tahun ketiga.

Dunn, William. diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Ekowati, Mas Roro Lilik. 2004. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra.

Gany, Radi. 2002. *Menyongsong Abad Baru dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal*. Makassar : Unhas press.

- Ibrahim. Amin. *Pokok-pokok Kebijakan Publik (AKP)*. 2004. Bandung : Mandar Maju
- Jones, Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Karten, David. 1980. *Community Organization and Development*, Public Administration Rev. Val. 40 no. 5 sept-okt 480-511.
- Mardiasmo. 1999. *Otonomi Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik*. makalah seminar *promoting good governance*.
- Moleong, Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muchtar M. 2000. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : IIP.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Prijono, Onny S. & A.M.W Pranaka. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Purwanto, Erwan Agus. 2004. *Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol.8., Nomor 2, (Nopember 2004). Yogyakarta : Magister Administrasi Publik-UGM.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Setiyono, Budi. *Jaring Birokrasi Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi*. 2002 : PT Gugus Press Bekasi.
- Siregar, Dolli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung : Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Responsi Pemerintah terhadap*

kesenjangan ekonomi. (Studi empiris pada kebijaksanaan dan program pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Indonesia)

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. *36 Kasus Kebijakan Publik Asli Indonesia*. Yogyakarta : BPFE

Tayibnapi, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.

Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.

Wahab, Solichin, Abdul. 1990. *Analisis Kebijaksanaan dari*

Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*. Jakarta : Inter Media.

Wibawa, Samodra. 1994. Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto, *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.